

EVALUASI KEBIJAKAN MENANGANI ANAK TIDAK SEKOLAH DI KABUPATEN PEKALONGAN (Studi Penelitian Program KUDU SEKOLAH – Kembalikan Upaya Dukungan Untuk Sekolah)

Safika Azhari¹, Muhammad Adnan²

Email: azharisafika051@gmail.com

**Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro**

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024)7465407

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id>. Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Sebelum adanya program gerakan KUDU Sekolah, permasalahan anak tidak sekolah di Kabupaten Pekalongan belum tertangani secara sistematis melalui regulasi atau program yang terstruktur. Kondisi ini diperparah oleh tantangan yang dihadapi sistem pendidikan yaitu ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan. Selain itu, persepsi masyarakat yang meragukan korelasi antara pendidikan tinggi dan kesuksesan ekonomi yang turut berkontribusi pada rendahnya angka partisipasi pendidikan di kalangan anak usia sekolah. Dari awal munculnya program Kudu Sekolah pada tahun 2019, jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Pekalongan berjumlah sebanyak 3949 anak dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 berjumlah 4850 anak. Dengan adanya program Kudu Sekolah pemkab berusaha untuk mengurangi angka tidak sekolah dan meningkatkan Pendidikan di Kabupaten Pekalongan untuk menjadi yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan program kudu sekolah yang ditinjau dengan hasil output keberjalanan pada tahun 2023, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dengan staf bapeda kabupaten pekalongan, serta masyarakat. Kajian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut wiliam n dunn (2003) yang menggunakan 6(enam) aspek yaitu efektivitas, efisiensi, perataan, responsivitas, ketepatan, dan kecukupan. Berdasarkan hasil lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kudu Sekolah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengatasi anak tidak sekolah di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019-2023, program ini berhasil mengembalikan sebanyak 2.396 anak ke jalur Pendidikan yang merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akses Pendidikan di tingkat daerah serta diimbangi dengan dukungan anggaran yang meningkat.

Kata kunci: Evaluasi, Program KUDU Sekolah, Kebijakan, Anak Tidak Sekolah

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Before the “KUDU Sekolah” Movement program, the issue of out-of-school children in Pekalongan Regency had not been systematically addressed through regulations or structured programs. This situation was exacerbated by challenges in the education system, such as unequal access to and quality of education. Additionally, the public's perception of the weak correlation between higher education and economic success contributed to the low education participation rate among school-age children. Since the introduction of the “KUDU Sekolah” program in 2019, the number of out-of-school children in Pekalongan Regency was recorded at 4,850 children, which increased in 2023. Through this program, the local government has been striving to reduce the number of out-of-school children and improve education in Pekalongan Regency. This study aims to evaluate the “KUDU Sekolah” program's policy by reviewing its outcomes in 2023, using a descriptive qualitative approach and data collection methods such as interviews with Bappeda staff and the community. The study uses William N. Dunn's (2003) policy evaluation theory, which involves six aspects: effectiveness, efficiency, equity, responsiveness, accuracy, and sufficiency. The findings show that the implementation of the “KUDU Sekolah” program has had a significant impact in addressing the issue of out-of-school children in Pekalongan Regency from 2019 to 2023. The program successfully re-enrolled 2,396 children into the education system, which is part of a continuous effort to improve access to education at the regional level, supported by an increasing budget. Since its launch, the “KUDU Sekolah” program has focused on reducing the number of out-of-school children through various strategies, including direct engagement with families who have children of school age but have dropped out, offering educational materials and free uniforms to encourage them to return to school. However, despite the progress, there are still some barriers to the success of the “KUDU Sekolah” program, such as the access gap caused by the zoning system and the fact that many village-level program teams have not yet mastered digital technology.

Keyword: *Evaluation, “KUDU Sekolah” Program, Policy, Out of School Children*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah, sebagai bentuk desentralisasi pemerintahan, bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional secara keseluruhan. Hal ini merupakan upaya untuk mendekati tujuan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan masyarakat yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Pasal 1 Ayat 8 UU Nomor 23 Tahun 2014). Dengan dasar desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengurus wilayahnya sendiri, memberikan keleluasaan dalam mengelola serta mengoptimalkan potensi lokal. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam menjamin hak-hak masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan. Di era globalisasi saat ini, pendidikan dianggap sebagai kebutuhan wajib dan aspek fundamental dalam kehidupan. Banyak individu yang berkorban untuk mencapai tingkat pendidikan tertinggi, karena memiliki

pendidikan yang lebih tinggi memberikan keunggulan dan penghormatan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan juga memberikan pengetahuan dan informasi mengenai berbagai fenomena baru, mulai dari hubungan antar individu hingga hubungan multilateral antar negara. Fakta ini mencerminkan betapa pentingnya peran pendidikan dalam kehidupan manusia.

Pendidikan memiliki peran penting dalam usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan pendidikan menjadi landasan utama bagi kemakmuran dan kemajuan suatu negara (Nurhayati, 2018). Oleh karena itu, upaya untuk menyelaraskan akses pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan menjadi aspek yang sangat penting untuk direalisasikan. Salah satu prioritas pembangunan dalam sektor pendidikan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, adalah meningkatkan pemerataan layanan pendidikan di

semua tingkatan dan mendukung percepatan pencapaian Wajib Belajar 12 tahun. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan layanan pendidikan ini, termasuk dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) agar bersedia kembali ke sekolah. Langkah-langkah tersebut melibatkan pendataan yang akurat dan terjangkau, pendampingan yang efektif, revitalisasi gerakan kembali sekolah, serta penerapan strategi pembelajaran yang sesuai untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), pekerja anak, anak yang menghadapi masalah hukum, anak terlantar, anak jalanan, dan anak di daerah bencana.

TUJUAN PENELITIAN

Kebijakan Pemerintah dalam mengevaluasi program gerakan (KUDU Sekolah) menangani Anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik tidak dapat dipublikasikan dengan mudah, kebijakan perlu dipantau dan salah satu mekanisme pemantauan disebut “Evaluasi Kebijakan”. Evaluasi kebijakan

bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan dalam menjaga tanggung jawabnya terhadap konsistensinya. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tujuan utama dari Evaluasi bukanlah untuk menyalahkan, namun untuk memeriksa sejauh mana kesenjangan antara hasil yang dicapai dan harapan kebijakan. Evaluasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya analisis dari fakta-fakta kebijakan. Jika monitoring merupakan prosedur analitis untuk menghasilkan informasi objektif tentang sebab dan akibat kebijakan program, maka evaluasi merupakan produksi informasi tentang nilai atau harga keluaran (output) kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah suatu proses yang melibatkan eksekusi keputusan kebijakan. Ini mencakup semua tindakan yang diambil oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta dengan tujuan mencapai sasaran kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. (Muhadjir, 1994), evaluasi kebijakan publik adalah upaya untuk mengukur keberhasilan suatu

kebijakan. Kita bisa melihat apakah kebijakan tersebut sudah mencapai tujuan yang ditetapkan dengan membandingkan hasil yang didapat dengan target yang ingin dicapai. Selain itu, evaluasi juga berguna untuk memeriksa apakah kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. (Agustino, 2008), mengemukakan tiga aspek penting dalam evaluasi kebijakan. Pertama, evaluasi harus menilai efektivitas instrumen kebijakan dalam mencapai tujuan. Kedua, evaluasi perlu memastikan kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan masalah yang ingin diatasi. Ketiga, evaluasi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan situs penelitian di Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi menggunakan observasi partisipan. Subjek dari penelitian ini yang akan menjadi informan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

kabupaten Pekalongan, Staf Bappeda Kabupaten Pekalongan serta Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Menangani Anak tidak sekolah di Kabupaten Pekalongan

(Studi penelitian program KUDU SEKOLAH- Kembalikan Upaya Dukungan Untuk Sekolah) Melalui Teori Evaluasi Kebijakan (William Dunn 2003)

1. Efektivitas

Sebelum adanya program gerakan KUDU Sekolah, permasalahan anak tidak sekolah di Kabupaten Pekalongan belum tertangani secara sistematis melalui regulasi atau program yang terstruktur. Gerakan KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan merupakan inisiatif yang didukung oleh Peraturan Bupati Pekalongan No. 48 Tahun 2019 tentang Wajib Belajar 12 Tahun. Peraturan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan program dan menetapkan kewajiban bagi semua anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Gerakan KUDU Sekolah memiliki tujuan yang jelas dan komprehensif dalam menangani masalah anak tidak sekolah di Kabupaten Pekalongan.

Melalui pengurangan jumlah ATS, peningkatan akses pendidikan, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, serta kolaborasi lintas sektor, program ini bertujuan untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, diharapkan program ini dapat mencapai tujuannya secara efektif dan berkelanjutan. Gerakan ini merupakan inisiatif yang melibatkan berbagai aktor dimulai dari pemerintah daerah, tim gerakan kudu sekolah, masyarakat serta pihak swasta.

Sebelum implementasi program KUDU Sekolah, indikator partisipasi pendidikan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI tercatat sebesar 96,44%, namun mengalami penurunan signifikan pada jenjang SMP/MTs menjadi 78,20%, dan semakin menurun pada jenjang SMA/MA menjadi 46,62%. Fenomena ini mengindikasikan adanya permasalahan transisi siswa

antar jenjang pendidikan, khususnya setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Rata-rata lama sekolah pada tahun tersebut adalah 7 tahun, yang setara dengan jenjang SMP kelas 1, jauh di bawah harapan lama sekolah yang mencapai 12 tahun. Inovasi KUDU Sekolah telah merata dilaksanakan di seluruh 285 desa/kelurahan di Kabupaten Pekalongan. Hal ini memastikan bahwa manfaat program dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya Anak Tidak Sekolah (ATS), di berbagai wilayah. Dari 4.346 Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tercatat di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019, inovasi KUDU Sekolah telah berhasil mengembalikan lebih dari separuhnya, yaitu sebanyak 2.396 anak, ke jalur pendidikan formal maupun nonformal

Hal ini membuktikan efektivitas program dalam mengatasi permasalahan ATS dan memberikan harapan baru bagi masa depan anak-anak di Kabupaten Pekalongan. Program KUDU Sekolah mengadopsi pendekatan holistik dalam penanganan anak tidak sekolah, dengan tidak hanya berfokus pada

pengembalian anak ke lingkungan pendidikan formal maupun nonformal, tetapi juga memastikan keberlangsungan partisipasi mereka dalam proses pembelajaran. Melalui inisiatif kunjungan rumah yang dilakukan secara proaktif oleh tim dari Dinas Pendidikan, program ini berupaya menjangkau anak-anak yang tidak bersekolah dan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Melalui upaya ini, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan dalam angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Pekalongan, yang pada gilirannya akan memberikan prospek yang lebih baik bagi masa depan pendidikan di wilayah tersebut. jumlah ATS Kabupaten Pekalongan yang telah berhasil dikembalikan ke sekolah terus meningkat, yang awalnya pada tahun 2019 hanya mencapai 389 anak kemudian pada tahun 2023 secara akumulasi mencapai 2.396 anak. Meskipun gerakan kudu sekolah ini mampu membuktikan efektivitas dalam mengembalikan ribuan angka anak tidak sekolah ke jalur formal maupun non formal di Kabupaten Pekalongan, namun angka anak tidak sekolah mengalami

peningkatan yang disebabkan oleh faktor seperti banyak keluarga di Kabupaten Pekalongan hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga anak-anak merasa terpaksa untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Pilihan untuk bekerja sering kali dianggap lebih realistis daripada melanjutkan pendidikan. Sebagian masyarakat masih memiliki pandangan bahwa pendidikan formal tidak memberikan jaminan masa depan yang lebih baik. Banyak orang tua percaya bahwa anak mereka bisa sukses tanpa harus menempuh pendidikan tinggi.

2. Efisiensi

Dukungan anggaran yang memadai merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan inovasi, dan hal ini terpenuhi dalam pelaksanaan KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan. Tersedia anggaran khusus yang dialokasikan untuk inovasi ini, yang memungkinkan program tersebut untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan mencapai tujuannya secara efektif. Anggaran KUDU Sekolah bersumber dari Pemerintah Kabupaten (APBD Kabupaten), Pemerintah Desa (APBD Desa),

dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat seperti CSR dan Badan Amil Zakat (BAZNAS). Selama pelaksanaan KUDU Sekolah dukungan anggaran terus mengalami peningkatan. Sebelumnya pada tahun 2018 anggaran pelaksanaan KUDU Sekolah hanya sebesar Rp 184.000.000. Saat ini, anggaran pada tahun 2023 mencapai Rp 4.010.600.000. Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan dalam pelaksanaan KUDU Sekolah, yaitu: 1) operasional siswa paket A, B, C; 2) pengembalian ATS (bantuan personel); 3) kunjungan rumah, rakor; 4) peningkatan inklusi; 5) pendataan, pengembangan KUDU Sekolah; 6) beasiswa siswa miskin & wajar Dikdas; 7) bantuan personal ATS; dan 8) bantuan sekolah gratis SD dan SMP yang muncul selama berlangsungnya program Kios Adminduk walaupun tidak berdampak secara signifikan. Kendala yang dihadapi, yaitu perbedaan kondisi pelayanan di masing-masing desa dan kecamatan serta masalah jaringan yang terkadang tidak stabil atau mengalami gangguan.

3. Kecukupan

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai menjadi penunjang keberhasilan inovasi. Tanpa adanya sarana dan prasarana, pelaksanaan inovasi pelayanan publik tidak bisa berjalan dengan baik. Pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana seperti perangkat komputer, perangkat aplikasi, dan buku panduan.

Untuk menghindari pendataan manual dan membantu proses pendataan ATS yang lebih akurat dalam verifikasi dan validasi, pendampingan, dan pemantauan perkembangan ATS yang kembali ke sekolah, sistem aplikasi diperlukan. Sistem aplikasi Gerakan KUDU Sekolah yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat digunakan sebagai referensi. Sistem aplikasi adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membuat pelaporan lebih mudah karena diproses secara otomatis dan ditampilkan dalam bentuk infografis yang mudah dipahami. Untuk membuat aplikasi berbasis Android lebih mobile dan

memudahkan update data. Sistem aplikasi dibuat oleh Bappeda Litbang dengan bantuan Dinas Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Pekalongan. Variabel data sistem aplikasi terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan. Bappeda membuat modul dan menawarkan pelatihan kepada tim kerja di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, pendamping, dan satuan pendidikan yang terlibat dalam pelaksanaan. Selain itu, manual penggunaan aplikasi disediakan untuk membuat pemakaian, input data, dan pemahaman sistem aplikasi lebih mudah. Sistem aplikasi berbasis web dan Android ini memiliki beberapa keuntungan, seperti:

1. Meningkatkan pendataan ATS dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam satu platform yang dapat diakses oleh tim kerja di berbagai tingkatan dan masyarakat secara keseluruhan
2. Mendukung proses pengintegrasian data ATS agar dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan di luar sektor Pendidikan

3. Menyediakan data real time terkait siswa, satuan pendidikan, dan pemantauan proses pendampingan
4. Misalnya, jika jumlah ATS yang dikembalikan lebih akurat, bantuan dapat disalurkan dengan lebih tepat sasaran.

Aplikasi KUDU Sekolah telah dikembangkan tiga kali untuk memenuhi kebutuhan dan masalah dari versi sebelumnya. Pada awalnya, aplikasi KUDU Sekolah hanya memiliki beberapa fitur, tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa fitur telah ditambahkan. Pengembangan pertama yaitu penambahan fitur monev. Fitur monev berguna untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap anak yang sudah kembali bersekolah sehingga terekap history/riwayat hal-hal apa saja yang dilakukan di sekolah. Pengembangan kedua yaitu penambahan fitur blank spot/offline. Aplikasi KUDU Sekolah sebelumnya tidak dapat digunakan di daerah blank spot (susah sinyal) sehingga menghambat proses penginputan data ATS. Adanya Fitur blank spot/offline bermanfaat untuk mempermudah penginputan data ATS tanpa akses internet. Pengembangan selanjutnya yaitu menambah beberapa informasi.

Pelaksanaan Gerakan KUDU Sekolah didukung oleh tersedianya berbagai buku panduan yang mempermudah implementasinya, seperti buku panduan pelaksanaan KUDU Sekolah, panduan penggunaan aplikasi KUDU Sekolah, dan panduan replikasi KUDU Sekolah. Contohnya, Buku Panduan Pelaksanaan Gerakan KUDU Sekolah Kabupaten Pekalongan 2020 yang memberikan petunjuk tentang mekanisme penanganan ATS melalui inovasi KUDU Sekolah. Selain itu, ada Buku Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan Gerakan KUDU Sekolah yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah lain yang ingin mereplikasi inovasi ini, dengan menyertakan petunjuk tentang langkah-langkah yang perlu disiapkan dan dilaksanakan. Buku Panduan Penggunaan Aplikasi KUDU Sekolah berfungsi sebagai tutorial untuk memandu penggunaan aplikasi KUDU Sekolah. Semua buku panduan tersebut dapat diakses secara online.

4. Perataan

Kebijakan pendidikan yang diterapkan, termasuk Program KUDU Sekolah dan kebijakan afirmatif lainnya, memiliki potensi signifikan dalam mengurangi kesenjangan akses dan kualitas

pendidikan antara berbagai kelompok siswa, terutama siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, siswa yang berada di daerah perkotaan, dan siswa dengan kebutuhan khusus. Salah satu langkah awal yang penting dalam upaya ini adalah penerapan kebijakan afirmatif melalui penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi yang mulai diterapkan sejak 2017. Kebijakan ini berfungsi untuk mendesegregasi jalur penerimaan siswa baru, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi siswa dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah berkualitas. Dengan cara ini, siswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah dapat mengakses sekolah-sekolah yang sebelumnya dianggap favorit, sehingga mengurangi kesenjangan akses pendidikan di antara kelompok-kelompok tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan zonasi berhasil meningkatkan keragaman sosial ekonomi di dalam sekolah dan mengurangi ketimpangan prestasi akademik yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi siswa.

Desa Tengeng Kulon telah mengambil inisiatif yang signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayahnya dengan memberikan sepeda gratis kepada siswa, yang bertujuan untuk memudahkan mereka dalam menjangkau sekolah dan mendorong semangat belajar, dan program ini didanai melalui dana desa yang dialokasikan untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan masyarakat setempat, langkah ini tidak hanya membantu mengurangi hambatan fisik yang sering dihadapi oleh anak-anak dalam perjalanan ke sekolah, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi tingkat putus sekolah di daerah tersebut. Dengan membangun lebih banyak sekolah dan menyediakan fasilitas belajar yang baik, siswa dari daerah terpencil dapat menikmati akses pendidikan yang setara dengan siswa di daerah perkotaan. Hal ini juga mencakup penyediaan sumber daya pendidikan seperti buku dan alat tulis untuk pembelajaran yang

diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya mencakup gedung sekolah tetapi juga akses ke teknologi informasi dan komunikasi yang semakin penting dalam era digital saat ini. Kebijakan pendidikan inklusif juga berperan dalam memastikan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak. Pekalongan memiliki 42 sekolah inklusif yang dirancang untuk memberikan pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mengoptimalkan layanan pendidikan inklusif, di mana setiap anak, tanpa memandang latar belakang atau kebutuhan khusus, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dengan adanya 42 sekolah inklusif, Pekalongan berkomitmen untuk menyediakan lingkungan belajar yang ramah bagi anak-anak berkebutuhan khusus, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk berkembang secara akademis dan sosial.

Pemerintah daerah juga melakukan intervensi dengan memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik agar mereka dapat menangani berbagai kebutuhan siswa dengan baik. Kebijakan ini tidak hanya berdampak positif pada peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi juga membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif. Dengan terus meningkatkan fasilitas dan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah inklusif ini, diharapkan semua siswa dapat belajar dalam lingkungan yang mendukung dan merangsang perkembangan mereka secara optimal. Program-program beasiswa dan bantuan pendidikan ditujukan untuk mendukung anak-anak dari keluarga kurang mampu serta anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat bersekolah tanpa hambatan finansial. Dengan demikian, kebijakan ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil bagi semua siswa. Pendidikan inklusif tidak hanya mencakup akses fisik ke sekolah tetapi juga penyesuaian kurikulum dan metode pengajaran untuk

memenuhi kebutuhan semua siswa. Namun, meskipun kebijakan-kebijakan ini menunjukkan kemajuan dalam mengatasi kesenjangan pendidikan, tantangan tetap ada. Masih terdapat ketimpangan dalam kualitas pengajaran antara daerah perkotaan dan pedesaan akibat kurangnya pelatihan bagi guru di daerah terpencil. Hal ini sering kali disebabkan oleh minimnya insentif bagi guru untuk mengajar di daerah terpencil serta kurangnya akses mereka terhadap pelatihan profesional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari lokasi geografis atau latar belakang sosial ekonomi mereka, menerima pendidikan berkualitas.

5. Responsivitas

Program Kudu Sekolah di Kabupaten Pekalongan telah berhasil menggait siswa dari pedesaan dan perkotaan melalui berbagai pendekatan yang inovatif dan proaktif, dengan tujuan utama mengurangi angka anak tidak sekolah (ATS) di wilayah tersebut.

Berikut adalah beberapa cara yang dilakukan oleh program ini untuk mencapai tujuannya:

1. Pendekatan Proaktif Tim dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Dinas Pendidikan secara aktif mengunjungi rumah-rumah warga yang memiliki anak usia sekolah tetapi tidak bersekolah. Melalui kunjungan ini, mereka dapat mengidentifikasi alasan di balik ketidakbersekolahan anak-anak tersebut, seperti masalah ekonomi, kurangnya informasi, atau hambatan transportasi. Dengan pendekatan langsung ini, tim dapat memberikan dukungan yang sesuai dan mendorong orang tua untuk mendaftarkan anak-anak mereka kembali ke sekolah.

2. Bantuan Biaya Pendidikan

Program ini juga menawarkan bantuan biaya pendidikan bagi keluarga yang membutuhkan. Dengan memberikan bantuan finansial, program Kudu Sekolah membantu mengurangi beban biaya yang sering menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka. Ini sangat

penting baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, di mana kondisi ekonomi keluarga bisa sangat bervariasi.

3. Penyediaan Transportasi

Salah satu tantangan utama bagi siswa di daerah pedesaan adalah akses ke sekolah yang mungkin terletak jauh dari rumah mereka. Program Kudu Sekolah berupaya untuk menyediakan solusi transportasi, seperti sepeda gratis, agar anak-anak dapat dengan mudah menjangkau sekolah. Ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga memotivasi anak-anak untuk pergi ke sekolah secara teratur.

4. Kolaborasi dengan Masyarakat

Program ini melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan orang tua, akan menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan pendidikan di wilayah mereka. Kolaborasi ini juga membantu dalam mendistribusikan informasi tentang pentingnya

pendidikan kepada semua lapisan masyarakat.

5. Penggunaan Teknologi

Aplikasi KUDU Sekolah berbasis web dan Android digunakan untuk memudahkan pendataan dan pemantauan anak-anak yang tidak bersekolah. Aplikasi ini memungkinkan tim KUDU Sekolah dan pihak sekolah untuk mengakses data real-time mengenai status pembelajaran siswa, termasuk kehadiran, prestasi akademik, dan masalah yang dihadapi. Dengan sistem ini, data tentang anak tidak sekolah dapat dikelola dengan lebih efisien dan transparan. dicapai

Salah satu faktor utama yang memudahkan tim Kudu Sekolah dalam menggait anak-anak dari desa adalah kultur sosial yang kuat dan saling mendukung di masyarakat desa. Di desa, nilai-nilai seperti gotong royong dan solidaritas sangat dijunjung tinggi. Masyarakat desa cenderung memiliki hubungan yang erat satu sama lain, sehingga ketika ada inisiatif untuk mendorong anak-anak kembali bersekolah, dukungan dari tetangga dan komunitas dapat

diperoleh dengan lebih mudah. Menggait siswa di wilayah desa seperti Lebakbarang ternyata lebih mudah dibandingkan dengan di kota, seperti yang ditunjukkan oleh data yang ada. Di Lebakbarang, dari 53 anak yang terdaftar, 41 anak berhasil dijangkau untuk bersekolah. Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi dalam upaya pendidikan di daerah tersebut, berbeda dengan yang ada di wilayah kota. Seperti Kedungwuni mereka sulit untuk di rayu karena berpikiran tidak sekolah pun mereka sudah mempunyai pekerjaan yang tetap dan bisa membangun usaha membuat lowongan pekerjaan banyak orang.

6. Ketepatan

Program "KUDU Sekolah" di Kabupaten Pekalongan telah terbukti efektif dalam menjangkau dan mengembalikan anak-anak yang tidak bersekolah (ATS) ke dalam sistem pendidikan. Pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah didalamnya terdapat dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

1) Anggaran

Pendanaan adalah faktor krusial dalam pelaksanaan inovasi. Implementasi inovasi KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan didukung oleh anggaran yang cukup memadai. Dana yang tersedia adalah anggaran khusus yang dialokasikan untuk pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah. Sumber dana KUDU Sekolah berasal dari Pemerintah Kabupaten (APBD Kabupaten), Pemerintah Desa (APBD Desa), serta sumber lainnya yang sah dan tidak terikat, seperti CSR dan Badan Amil Zakat (BAZNAS). Seiring dengan pelaksanaan KUDU Sekolah, dukungan anggaran terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, anggaran untuk KUDU Sekolah hanya sebesar Rp 184.000.000, namun pada tahun 2023, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp 4.010.600.000. Anggaran ini digunakan untuk berbagai kegiatan dalam pelaksanaan KUDU Sekolah, antara lain: 1) operasional siswa paket A, B, C; 2) pengembalian ATS (bantuan personel); 3) kunjungan rumah, rapat koordinasi; 4) peningkatan inklusi; 5) pendataan dan pengembangan KUDU Sekolah; 6) beasiswa untuk siswa

miskin dan wajib pendidikan dasar; 7) bantuan personel ATS; dan 8) bantuan sekolah gratis untuk SD dan SMP.

2) Pemenuhan Sarana Prasarana

Keberhasilan inovasi KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Perangkat komputer, aplikasi, dan buku panduan yang lengkap telah mendukung pelaksanaan inovasi ini secara efektif dan efisien. Aksesibilitas yang mudah dan stabilitas aplikasi KUDU Sekolah semakin memperlancar proses pendataan, pemantauan, dan evaluasi.

3) Dukungan Aplikasi KUDU Sekolah

Aplikasi KUDU Sekolah tersedia dalam 2 versi yaitu website dan android. Aplikasi KUDU Sekolah ini handal dan aman karena dibangun dengan teknologi terbaru yaitu versi website menggunakan Framework Laravel 7 dan versi android menggunakan Kotlin. Website lebih mudah untuk menyajikan infografis dan melihat laporan-laporan. Android yang sifatnya mobile lebih mudah untuk

updateding data. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses aplikasi KUDU Sekolah versi website melalui laman <https://kudusekolah.pekalongkab.go.id/> dan untuk android dapat mengunduh melalui Google Play Store. Pengembalian Anak Tidak Sekolah.

Mekanisme pengembalian ATS melalui inovasi KUDU Sekolah terdiri dari 7 tahapan. Berikut mekanisme pelaksanaan KUDU Sekolah yang dijelaskan pada Buku Panduan Pelaksanaan Gerakan KUDU Sekolah.

1. Pendataan ATS

Awalnya data ATS dihimpun dari berbagai sumber yaitu Basis Data Terpadu (BDT), Dapodik Dinas Pendidikan, data EMIS Kemenag, dan data Pendidikan Usia Sekolah (PUS). Sedangkan data ABK diperoleh dari Dinas Sosial. Seiring berjalannya waktu pihak desa juga melakukan pendataan ATS yang belum masuk pada pendataan awal baik dari pendataan yang langsung dilakukan oleh pihak desa maupun data dari usulan masyarakat.

2. Verifikasi dan Validasi Data

Data ATS yang sudah terkumpul kemudian dilakukan verifikasi dan validasi data. Verval data ATS

bertujuan untuk meng-cross check kebenaran data ATS. Verval data dilakukan berdasarkan by name by address sesuai dengan yang ada di lapangan sehingga data ATS menjadi satu data terintegrasi dan akurat. Verval dilakukan oleh Tim KUDU Sekolah tingkat Desa.

3. Rekonfirmasi Data

Rekonfirmasi data bertujuan untuk mengetahui apakah ATS yang telah terdata mau kembali bersekolah atau tidak. Rekonfirmasi data dilakukan dengan mengunjungi rumah ATS (door to door). Rekonfirmasi data atau pemutakhiran data dilakukan secara berkala terhadap data ATS karena datanya bersifat dinamis. Rekonfirmasi data dilakukan oleh Tim KUDU Sekolah tingkat Desa dan seluruh data disampaikan kepada Tim KUDU Sekolah tingkat Kecamatan. Kemudian Tim KUDU Sekolah tingkat Kabupaten menetapkan daftar final ATS sebagai penerima manfaat KUDU Sekolah.

4. Pendampingan Anak dan Keluarga ATS

Pendampingan anak dan keluarga ATS bertujuan untuk melakukan komunikasi persuasif dengan anak dan keluarga ATS. Pendampingan

berupa pemberian motivasi, sosialisasi, dan edukasi terkait KUDU Sekolah. Pendampingan di wilayah desa biasanya dilakukan oleh Pemdes, Tim Penggerak PKK, tokoh masyarakat, dan paguyuban penyandang disabilitas.

5. Penentuan Pemilihan Satuan Pendidikan

Bagi ATS yang mau kembali bersekolah menentukan pilihan satuan pendidikan di sekolah formal atau nonformal. Satuan pendidikan dipilih oleh anak/keluarga ATS. Pemilihan satuan pendidikan didampingi oleh Tim Gerakan KUDU Sekolah.

6. Pendampingan Peserta Didik dan Satuan Pendidikan

Tim Pendamping Gerakan KUDU Sekolah memberikan pendampingan kepada ATS yang telah dikembalikan ke sekolah dengan melakukan pendekatan secara personal berupa motivasi dan pemahaman terkait pentingnya pendidikan. Sedangkan pendampingan bagi satuan pendidikan dilakukan oleh Tim Pendamping Gerakan KUDU Sekolah dengan memberikan arahan baik kepada satuan pendidikan formal maupun

nonformal agar menjamin pendidikan ATS yang telah kembali bersekolah.

7. Monitoring Perkembangan Peserta Didik

ATS yang telah kembali ke sekolah dipantau oleh pengawas dan pihak sekolah. Pemantauan dilakukan untuk memastikan ATS yang telah kembali bersekolah dapat menyelesaikan pendidikannya dan memantau hasil capaian pembelajaran yang bersangkutan. Pemantauan oleh satuan pendidikan dilaksanakan secara rutin setiap bulan melalui aplikasi KUDU Sekolah. Satuan pendidikan melaporkan hasil pemantauan kepada Tim Pengawas Sekolah/Korwil tingkat Kecamatan dan Tim Gerakan KUDU Sekolah tingkat Desa.

b. Faktor Penghambat

Pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan masih menghadapi beberapa kendala terkait sumber daya manusia (SDM). Program ini dijalankan oleh Tim Gerakan KUDU Sekolah, yang terdiri dari tiga tingkat: satu tim di tingkat kabupaten, 19 tim di tingkat kecamatan, dan 285 tim di tingkat desa. Tim pelaksana telah dilatih

untuk menggunakan aplikasi KUDU Sekolah, dengan pelatihan yang diadakan di masing-masing kecamatan dan melibatkan semua desa. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan diundang sebagai narasumber untuk memberikan pelatihan tersebut. Selain itu, buku panduan penggunaan aplikasi juga disediakan untuk memudahkan penggunaannya. Namun, dalam praktiknya, masih ada tim KUDU Sekolah di tingkat desa yang mengalami kesulitan dalam menguasai teknologi. Beberapa anggota tim masih melakukan penginputan data anak tidak sekolah (ATS) secara manual menggunakan Excel, padahal seharusnya data tersebut dimasukkan melalui aplikasi KUDU Sekolah. Selain itu, terdapat juga pelaksana yang kurang disiplin dalam mengikuti semua tahapan dalam aplikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KESIMPULAN

Evaluasi Kebijakan Program KUDU Sekolah dalam menangani Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang kurang

memuaskan. Hal ini disebabkan oleh indikator efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas dan ketepatan yang didefinisikan dalam kriteria evaluasi kebijakan oleh William Dunn (2003). Dari kelima indikator yang tidak mampu dipenuhi tersebut, kekurangan yang terdapat pada indikator Efektivitas, efisiensi dan Pemerataan. Dalam hal ini, gerakan kudu sekolah ini mampu mengembalikan ribuan anak ke dalam pendidikan formal dan non formal akan tetapi belum maksimal mengurangi angka anak tidak sekolah yang mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena banyak keluarga di Kabupaten Pekalongan hidup dalam keterbatasan finansial yang memaksa anak-anak untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Pilihan untuk bekerja sering dianggap lebih realistis daripada melanjutkan pendidikan. Anggaran yang terus meningkat akan tetapi angka anak tidak sekolah juga terus meningkat, hal ini menunjukkan bahwa dalam penanganan kasus anak tidak sekolah harus benar-benar di tekan. Pemkab juga masih sulit mengatasi dalam hal kesenjangan akses dengan adanya jalur zonasi.

Kebijakan zonasi meskipun bertujuan baik untuk pemerataan, justru dapat menghambat akses pendidikan di tingkat daerah. Kebijakan zonasi, yang mengutamakan jarak tempat tinggal ke sekolah, secara tidak langsung membatasi pilihan siswa. Mereka "terbelenggu" karena tidak bisa memilih sekolah berdasarkan minat atau kemampuan akademis, melainkan hanya pada kedekatan geografis, ini bisa merugikan siswa berpotensi yang tinggal di area dengan kualitas sekolah yang kurang baik. Sistem zonasi juga menghilangkan persaingan berdasarkan nilai, artinya, siswa dengan prestasi tinggi pun harus bersaing hanya berdasarkan jarak, bukan kemampuan mereka. Jalur prestasi dan afirmasi dihadirkan sebagai solusi untuk memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi atau dari keluarga kurang mampu. Namun, kuota yang "masih sedikit" untuk jalur afirmasi menunjukkan bahwa kesempatan yang diberikan belum sebanding dengan kebutuhan. Meskipun ada upaya untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan, implementasi kebijakan zonasi yang tidak diimbangi dengan kuota yang

memadai untuk jalur alternatif dapat memperburuk situasi. Sistem yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa, terutama mereka yang berasal dari kelompok marginal. Dengan kata lain, sistem zonasi berpotensi menciptakan lingkaran jelek, di mana siswa dari lingkungan yang kurang baik terjebak di sekolah yang kurang baik, sementara siswa dari lingkungan yang lebih baik memiliki akses ke sekolah yang lebih baik. Ini tentu bertentangan dengan tujuan pemerataan pendidikan yang seharusnya diusung.

Pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah yaitu tersedianya anggaran yang memadai, sarana dan prasarana yang memadai, sistem aplikasi tersedia dalam dua versi (website & android) yang memudahkan pendataan-pemantauan-evaluasi dan dapat diakses tanpa internet, serta prosedur pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah mudah dan

didukung dengan kegiatan door to door ke rumah ATS. Faktor penghambat pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah yaitu masih ada Tim KUDU Sekolah Tingkat Desa yang kurang menguasai teknologi dan kurang disiplin.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terdapat saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah yaitu:

1. Diperlukan adanya Evaluasi terkait pengurangan dan penggunaan anggaran untuk angka anak tidak sekolah agar angka tidak sekolah tidak mengalami peningkatan serta kebijakan zonasi dengan mempertimbangkan faktor geografis dan infrastruktur serta mempertimbangkan alternatif seleksi yang lebih adil seperti memperkuat jalur prestasi atau menambah kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

2. Untuk meningkatkan profesionalisme Tim KUDU Sekolah tingkat Desa perlu dilakukan monitoring dan pendampingan secara rutin oleh Kepala Desa sehingga mampu mengoperasikan aplikasi KUDU Sekolah secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, Teuku dkk. Studi Tentang Penurunan Jumlah Anak Tidak Sekolah Di Kabupaten Pekalongan

Agustino, Leo, 2008. Dasar - Dasar Kebijakan Publik, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung

Ahmad Fauzi, Andi Murfhi dkk. (2012). Analisis Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4, Nomor 2, Juli 2012 halaman 85-89

Anggun Trytami, Vina Karmilasari. Sistem Kebijakan Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kota Palembang.

Bappenas. (2020). Strategi nasional penanganan anak tidak sekolah di Indonesia. Bappenas.Go.Id. www.bappenas.go.id

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). Dalam Angka. Bps.Go.Id. www.bps.go.id.

Benjamin, Morin dan Singkoh, Frans. Strategi Dinas Pendidikan Dalam

Creswell, J. W. (2010). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

Daniel. Moehar. (2002). Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Jakarta: Bumi Aksara

Edrial Rangga. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Di SMA Negeri 1 Utan Tahun 2019-2020. Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik Volume 3 1 Juni 2022

Irfan, Cahyo Dwi. 2021. "Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah Di Desa Kungkai Baru, Kabupaten Seluma, Bengkulu." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8(1): 1–20.

Kudusekolah.pekalongankab.go.id (2023)

Madaniah, Fitria, Siti Nurjannah, and Meity Suryandari. 2023. "Sebab Akibat Banyak Anak Di Indonesia Yang Putus Sekolah

Maghfirah, Destiar A. 2019. "Faktor-Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah Tingkat SMA/SMK Negeri Di Kota Mataram." *Jurnal Kebijakan Pendidikan*

Meta Rizki,dkk.Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kota Malang. FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Muhadjir Darwin.Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta 1994 Nurhayati, E. (2018). Psikologi pendidikan inovatif. Pustaka Belajar.

Mustari,dkk.(2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penanganan Anak Putus Sekolah Di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.*Jurnal Pemikiran, Penelitian, Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 9 nomor 3,september 2022

Perhati, Tina Aris, Indahwati, and Budi Susetyo. 2017. "Identifikasi Karakteristik Anak Putus Sekolah Di Jawa Barat Dengan Regresi Logistik." *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications* Putri, F. K. A., Kholis Amalia, I., & Hakim, M. L. (2022). Gerakan Remaja Hebat untuk Penanganan Anak Tidak Sekolah. *Kifah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 71–82. <https://doi.org/10.35878/KIFAH.V1I1.41>

Portal Data Kemendikbud Ristek (2021-2023). Dalam data putus sekolah. <https://data.kemdikbud.go.id/>

Prasetyo, A. G. (2016). *Campus Social Responsibility dan Basekolah: Inovasi Penanganan Anak Putus Sekolah*. Pdf <https://www.academia.edu/en/31797509/CampusSocial>

Pratama, Salmi Wati, Arifmiboy, Iswantir M. 2023. "Faktor Penyebab Remaja Putus Sekolah Di Jorong Setia Kecamatan Dua Koto Kabupaten 133 Pasaman." *Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*

Rosa Indah. (2024). Evaluasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Wiyung. *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan* Volume 9 nomor 8 Januari-Maret 2024

Setyawati,Martani.(2023). Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah Di

Kabupaten Sragen. *Jurnal Litbang Sukowati:Media Penelitian dan Pengembangan*,Vol 7,No 1,Mei 2023,Hal 92-103.

Soetrisnaadisendjaja, Denny, and Nurkartika Sari. 2019. "Fenomena Anak Putus Sekolah Di Kawasan Industri Kota Cilegon." *Hermeneutika : Jurnal Hermeneutika*

Sugiyono(2015). *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D*.Bandung.Alfabeta

Tri Wulandari. (2024). *Evaluasi Kebijakan Program Sekolah Sahabat Keluarga Di SMAN 7 Pekanbaru.*

Triyani Lestari. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Sekolah Siswa Di Kota Pekalongan.*

Utami, Wiwid Novia, and Ainur Rosyid. 2020. "Identifikasi Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah Di Tingkat Sekolah Dasar Wilayah Duri Kepa." *Jurnal Pendidikan Dasar:*

Wardani, Yohana Devi et al. 2021. "Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah Pada Jenjang Pendidikan SD Dan SMP Di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang." *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)* 1(12): 1294–1301

Warisna Andani, Mohamad Mustari, Bagdawansyah Alqadri,Sawaludin. 2023. "Upaya Menanggulangi Anak Putus Sekolah Di Kampung Polak Penyayang Desa Masbagik Selatan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*

William N.Dunn. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*,Edisi Kedua,Gadjah Mad.Yogyakarta

Zakaria, Rizki Yati. 2019. "Analisa Sosiologis Tentang Anak Putus Sekolah Di Desa Merah Mege Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Economica Didactica*